

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Partai Golkar dan NasDem dalam Pendidikan Politik Bagi Kader di Kabupaten Sidrap

Di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: “*setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*”¹ Dari bunyi Pasal 31 ayat (1) ini menegaskan bahwa warga negara Indonesia selain mendapatkan pendidikan dasar warga negara Indonesia berhak, untuk mendapatkan pendidikan politik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik dinyatakan dalam Pasal 7 bahwa:

1. Kelompok sasaran fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:
 - a. Partai politik
 - b. Partai politik local
 - c. Organisasi kemasyarakatan
 - d. Lembaga nirlaba lainnya, dan
 - e. Lembaga atau instansi vertikal di daerah.

Partai politik yang merupakan salah satu subjek dari pendidikan politik, hal ini terkait fungsi dari partai politik itu sendiri menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang mana partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,

¹Lihat Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (1)

berbangsa dan bernegara. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pasal tersebut jelas dikatakan bahwa partai politik memiliki fungsi memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara dan setiap warga negara juga berhak menerima pendidikan itu. Misalnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada anggota dan kader partai.

Menurut Pasal 34 ayat (3a) menjelaskan bahwa: Dalam melaksanakan pendidikan politik partai politik mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat.²

Dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bantuan keuangan tersebut digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).³ Adapun bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud diatas, antara lain berupa:

- a. Seminar
- b. Lokakarya

²Lihat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

³Lihat Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012.

- c. Dialog Interaktif
- d. Sarasehan
- e. workshop⁴

Kewajiban partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik tidak sekedar karena perintah konstitusi, lebih dari itu partai politik mempunyai tanggung jawab moral terhadap konstituen dan pendukungnya, selain itu perkembangan politik seperti perubahan sistem politik di Indonesia juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Dalam sebuah partai politik Anggaran Dasar (AD) merupakan kebijakan tertinggi dalam partai yang menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya dalam melaksanakan aktivitas politik partai. Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan aturan yang menjabarkan lebih lanjut mengenai isi dari Anggaran Dasar partai politik tersebut. Sehingga dapat dikatakan Anggaran Dasar (AD) memberi arahan kepada partai tentang apa yang harus dilakukan dan sebaliknya.

Untuk mengetahui peran partai politik dalam pendidikan politik partai Golkar di Kabupaten Sidrap, berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Murni Madjid, BA (65 tahun) yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sidrap.

“pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar yang setiap tahun diprogramkan bertujuan untuk mencerdaskan anggota masyarakat terutama kader partai sehingga dapat mengetahui cara berpolitik yang baik dan benar”.⁵

⁴Lihat Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APDB, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

⁵Murni Madjid, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Sekretariat Partai Golkar, 5 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya terkait pendidikan politik, Partai Golkar setiap tahun menyusun program kerja. Melalui pendidikan politik ini anggota atau kader partai diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai. Sehingga kader memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun.

Pendidikan sangat jelas tujuannya untuk membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta untuk membentuk kemampuan partisipasi politik pada individu, agar nantinya individu tersebut menjadi partisipan politik dalam bentuk positif. Selain itu, pendidikan politik diperlukan untuk menunjukkan cara berpolitik yang sehat, bersaing dengan sehat, dan mendidik masyarakat mematuhi aturan.

Sependapat dengan DPD Partai Golkar, dalam wawancara pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan Bapak Muhammad Fitrah Anugrah. HM (27 tahun) selaku Wakil Sekretaris DPD Partai NasDem di kediamannya di Pangkajene, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, bahwa:⁶

“latar belakang diadakan pendidikan politik oleh Partai NasDem karena secara internal memang diwajibkan untuk melakukan pendidikan politik berupa pemahaman ke kader atau anggota partai, terlebih ada aturan yang jelas mengatur terkait pendidikan politik.“

Secara umum partai Golkar dan NasDem dalam menjalankan pendidikan politik dilakukan dengan dua metode yaitu: *Pertama*, pendidikan politik secara formal yaitu bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh partai secara formal dan mempunyai sifat legal dalam konstitusi partai. Pendidikan politik secara formal ini dapat dilihat dengan membedah program-program kerja partai Golkar dan NasDem di Kabupaten Sidrap dalam fungsinya sebagai sarana pendidikan politik yang sudah

⁶Muhammad Fitrah, salah satu wakil Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 18 Oktober 2020.

disahkan oleh mekanisme internal partai. *Kedua*, metode pendidikan politik secara informal dapat diartikan dengan proses pendidikan politik yang dilakukan dengan konsep tidak formal melalui diskusi pada mimbar bebas dan pendekatan personal.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis melalui dokumentasi dan wawancara, terungkap bahwa terkait pendidikan politik dalam Anggaran Dasar Partai Golkar tidak dijelaskan secara tegas mengenai pendidikan politik, akan tetapi dari beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Partai Golkar tersirat mengenai pendidikan politik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan tentang tugas-tugas dari ketua-ketua bidang internal dan ketua-ketua bidang program partai. Berikut penulis uraian strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik bagi kader, yaitu:

1. Pendidikan Politik Formal

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan politik formal yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Sidrap, berikut penulis paparkan wawancara dengan Bapak Murni Madjid selaku Wakil Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) DPD Partai Golkar⁷:

“Secara umum bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar berupa Rapat Kerja Daerah (Rakerda), sarasehan, seminar, dialog interaktif. Anggota masyarakat yang telah menyatakan bergabung dengan Partai Golkar, akan diberikan pendidikan politik berkelanjutan guna untuk meningkatkan wawasan terkait visi misi Partai Golkar dan bagaimana cara berpolitik yang sehat dan benar”

Lebih lanjut,

“Untuk kader, partai Golkar juga mengadakan Pekan Orientasi selama satu minggu materi yang disampaikan berupa tugas ketika menjadi anggota dewan, peranan partai dalam fraksi karena anggota dewan adalah perpanjangan tangan dari Partai Golkar itu sendiri. Setiap peserta harus

⁷Murni Madjid, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Sekretariat Partai Golkar, 5 Oktober 2020.

mendapatkan sertifikat kelulusan, partai Golkar tidak akan meluluskan kader yang tidak memenuhi syarat.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar benar telah dilaksanakan berupa Rapat Kerja Daerah (Rakerda), sarasehan, seminar dan dialog interaktif dan untuk kader sendiri akan diberikan pendidikan politik berkelanjutan berupa Pekan Orientasi selama satu minggu dengan tujuan kader dapat lebih memahami visi dan misi Partai Golkar sehingga dapat digunakan untuk mempersiapkan pemimpin yang bertanggungjawab, mempunyai dedikasi yang baik, bermoral, iman dan taqwa. Melalui pendidikan politik ini kader akan benar-benar mengetahui dan memahami asas maupun tujuan partai Golkar.

Pelatihan bagi kader Partai Golkar untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik. Strategi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kader Partai Golkar terhadap politik. Pelatihan tersebut berguna untuk menyamakan persepsi kader-kader Partai Golkar. Dari pemaparan informan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai Golkar belum mampu memberikan pemahaman kepada kadernya dengan baik. Namun Partai Golkar menyadari hal tersebut, untuk memaksimalkan kegiatan pendidikan politik terutama untuk kader yang belum memahami materi pendidikan yang telah dilaksanakan, maka Partai Golkar kembali mengadakan seminar, hal ini dibenarkan oleh Bapak Murni Madjid sebagai berikut:⁸

“Untuk memaksimalkan pendidikan politik untuk kader, kita kembali melaksanakan pendidikan politik berupa seminar, sarasehan, ataupun dialog kepada kader, hingga mereka betul-betul memahami tujuan dari pendidikan politik yang kami laksanakan”

⁸Murni Madjid, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Sekretariat Partai Golkar, 5 Oktober 2020

Upaya pendidikan politik yang dilaksanakan Partai Golkar selanjutnya yaitu menyisipkan pendidikan politik melalui kegiatan sayap partai dan organisasi pendiri Partai Golkar. Partai Golkar adalah partai dengan organisasi terkait yang cukup banyak, seperti KOSGORO, AMPG, KPPG, HWK dan lainnya. Banyaknya organisasi terkait tersebut dimanfaatkan Partai Golkar dengan menanamkan pendidikan politik melalui kegiatan organisasi-organisasi tersebut.

2. Pendidikan Politik Informal

Upaya pendidikan politik secara informal yang dilaksanakan oleh Partai Golkar di Kabupaten Sidrap adalah mengajarkan pendidikan politik kepada kader dengan pendekatan personal. Kader merupakan seseorang yang memiliki peran dalam pelaksanaan program kerja partai. Partai Golkar menerapkan pendekatan personal dalam mengajarkan pendidikan politik. Karena dengan pendekatan personal materi pendidikan politik akan lebih mudah diterima oleh kader. Berikut wawancara dengan bapak Murni Madjid:⁹

“Kita mempunyai perwakilan dari tiap desa, kelurahan dan kecamatan, kader yang telah mendapatkan pendidikan politik biasanya turun ke rumah-rumah warga untuk menyampaikan pendidikan politik ke masyarakat, sehingga dengan masyarakat pun tahu mengenai visi misi Partai Golkar, selain itu kita ajarkan terkait cara memilih pemimpin yang benar”

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Partai Golkar tidak hanya berfokus dalam memberikan pendidikan politik kepada kadernya saja, tetapi kepada masyarakat ataupun dalam hal ini adalah pemilihnya. Hal ini juga dapat menjadi tolok ukur bahwa pendidikan politik yang diberikan kepada kader telah berhasil karena kader sudah dapat turun ke masyarakat langsung dan memberikan pendidikan politik.

⁹Murni Madjid, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Sekretariat Partai Golkar, 5 Oktober 2020

Untuk Partai NasDem sendiri melaksanakan pendidikan politik yang kurang lebih sama dengan Partai Golkar. Dalam Anggaran Dasar Partai NasDem Bab VI Pasal 12 dijelaskan terkait pendidikan politik sebagai berikut:

1. Partai menjalankan pendidikan politik secara internal dan eksternal.
2. Pendidikan politik internal berupa materi pengkaderan internal sesuai dengan jenjang dalam sistem kaderisasi.
3. Pendidikan politik eksternal diperuntukan untuk seluruh warga negara berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai NasDem di Kabupaten Sidrap maka dari itu, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah (27 tahun) selaku salah satu wakil sekretaris DPD Partai NasDem berikut:¹⁰

“Tiap tahun Partai NasDem memprogramkan pendidikan politik, karena anggaran bantuan untuk parpol yang diterima, secara istimewa dikhususkan untuk pendidikan politik sesuai aturan yaitu sebanyak 60% dari anggaran”

Berdasarkan data yang penulis dapatkan berikut beberapa agenda pendidikan politik formal yang telah dilakukan oleh Partai NasDem Kabupaten Sidrap selama tahun 2019 secara internal partai:

1. Pelatihan Kader Partai NasDem

Pelatihan yang bagi kader yang dilakukan Partai NasDem adalah Akademi Bela Negara (ABN) yang pertama kali dilaksanakan pada 1 Juli 2017. Akademi ini dirancang untuk memfasilitasi pendidikan politik kader-kader bangsa agar mampu menjadi agen perubahan yang arif membaca dinamika sosial dalam demokrasi, serta

¹⁰Muhammad Fitrah, salah satu wakil Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 18 Oktober 2020.

tentu saja kuasa untuk bersikap dan bertindak bijak, efektif dan bertanggung jawab. Akademi Bela Negara (ABN) ini diprogram setiap tahun oleh Partai NasDem dipusatkan di Jakarta, pesertanya berasal dari kader Partai NasDem dari 34 provinsi dipilih secara ketat dan bertanggung jawab dari internal kader Partai NasDem di daerah masing-masing.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu kader partai NasDem yakni Bapak Hasmaruddin (36 tahun)¹¹:

“Untuk ikut dalam Akademi Bela Negara (ABN) kader yang pilih untuk mewakili kabupaten sidrap tidak sembarang tapi dipilih secara ketat, dan kita dibatasi Cuma satu sampai dua orang saja”.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Akademi Bela Negara yang dilakukan oleh Partai NasDem Pusat kader, harus memiliki kompetensi dan dapat memenuhi syarat karena yang mengikuti ABN ini dibatasi hanya satu sampai dua orang di setiap daerah, karena memang dalam ABN ini kader diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam dinamika sosial dalam demokrasi.

Selain itu di Partai NasDem ada organisasi sayap partai seperti Garda Pemuda, Garnita Mala Hayati, dan lain-lain. Dari organisasi sayap ini dimanfaatkan oleh partai NasDem untuk memberikan pendidikan politik dalam setiap kegiatannya. Menurut Bapak Suhri Nur (51 tahun):¹²

“Di Partai NasDem ada Garda Pemuda, Garnita Mala Hayati jadi pendidikan politik itu turun dari kader-kader ini”

Lebih lanjut,

¹¹Hasmaruddin, salah satu kader DPDP Partai NasDem Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Sekretariat DPD Partai NasDem, 18 Oktober 2020.

¹²Suhri Nur, salah satu kader DPD Partai NasDem Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Sekretariat Partai NasDem Kabupaten Sidrap, 10 Oktober 2020.

“Garda Pemuda misalnya, program kerja kita itu melatih anak muda dengan memberikan wawasan bela negara, pemahaman demokrasi, pendidikan kebangsaan, bakti sosial”

Dari pemaparan informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai NasDem untuk kadernya benar-benar dilakukan mulai dari tingkat organisasi sayap hingga kader yang dapat mengikuti Akademi Bela Negara dilakukan secara berkesinambungan sehingga menciptakan kader yang memiliki dedikasi tinggi baik untuk partainya sendiri maupun bagi masyarakat.

2. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai NasDem Kabupaten Sidrap

“Rapat kerja merupakan salah satu pendidikan politik karena dalam rapat ini melibatkan semua unsur, unsur pimpinan partai, pengurus harian, sayap partai juga dilibatkan”

Dalam rapat kerja, peserta yang hadir diberikan pemahaman terkait visi misi partai, tujuan partai dan program-program partai yang akan dilaksanakan. Hal ini kurang lebih merupakan bagian dari pendidikan politik.

3. Sekolah Legislatif

Tujuan utama sekolah legislatif adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada kadernya. Materi yang diajarkan berupa visi misi dan garis politik partai, pemahaman terkait tugas dan fungsi legislatif serta hal-hal teknis yang berkaitan dengan tugas legislatif sehingga kader mampu menjalankan tugas konstitusi secara baik dan sungguh-sungguh mengabdikan kepada masyarakat.. Peserta dalam sekolah legislatif ini adalah kader-kader partai khususnya yang berada di DPR, DPRD di kabupaten/kota dan DPRD provinsi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Fitrah sebagai berikut:¹³

¹³Muhammad Fitrah, salah satu wakil Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 18 Oktober 2020.

“Sekolah Legislatif diadakan untuk anggota dewan Partai NasDem saja, karena namanya legislatif baru dinyatakan legislatif apabila sudah masuk menjadi anggota dewan, kader yang sudah terpilih walaupun belum dilantik menjadi anggota dewan dapat mengikuti sekolah legislatif ini ”

Lebih lanjut

“Dari 504 kabupaten/kota di Indonesia, semua anggota dewan yang terpilih dipanggil untuk mengikuti sekolah legislative ini yang di pusatkan di Jakarta waktu ini”

Pelaksanaan sekolah legislatif ini dilakukan oleh DPP dan DPD seluruh Indonesia dengan menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya, adapun materi yang diajarkan dalam sekolah legislatif diantaranya:

- 1) Kelembagaan negara dan sistem parlemen negara
- 2) Sistem desentralisasi: prinsip-prinsip hubungan pusat daerah dengan eksekutif dan legislatif
- 3) Misi perjuangan konstitusional Partai NasDem : agenda restorasi Indonesia
- 4) Poisoning Fraksi Partai NasDem sebagai Fraksi Pemerintah
- 5) Prosedur kerja kelembagaan DPRD
 - a. Prosedur kerja kelembagaan Dewan (Persidangan dan Reses)
 - b. Legislasi, konstitusionalitas dan penyusunan PERDA (legal Drafting)
 - c. Dana transfer daerah dan pengawasan
 - d. Etos kerja, kelembagaan *re-calling* dan kode etik
 - e. Anggota dewan yang bermartabat dan tidak korupsi.
- 6) Sistem kerja pendukung: keprotokolan, administratif dan keahlian
- 7) Team Building citra busana dan Table Manner

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa materi yang diberikan dalam sekolah legislatif, lebih berorientasi pada pemahaman kader yang telah terpilih menjadi anggota dewan legislatif dalam hal ini terkait fungsinya sebagai anggota legislatif.

Selain agenda pendidikan politik secara formal di atas, DPD Partai NasDem juga memberikan pendidikan politik informal dalam bentuk diskusi yang dapat dilakukan dimanapun, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Fitrah:¹⁴

“Dalam satu tahun partai NasDem bisa sampai tiga kali mengadakan pendidikan politik yang sifatnya formal, itu normalnya, tapi tahun ini tidak dapat dilaksanakan karena terhalang pandemi covid-19, kalau pendidikan politik selain itu dapat dilakukan setiap hari dan dimana pun, misalnya kita diskusi lepas diwarung kopi. Hal ini merupakan pendekatan personal yang kita lakukan karena tidak dapat melakukan pendidikan politik seperti biasanya.”

Dari wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa partai NasDem berupaya tetap menyampaikan pendidikan politik kepada kadernya dengan pendekatan personal, namun penulis menilai bahwa hal ini tidak efektif mengingat bahwa hanya sebagian kecil kader yang mendapatkan materi pendidikan politik.

Partai NasDem telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pendidikan politik internal (kader dan anggota partai), namun masih perlu adanya evaluasi, agar tujuan dari pendidikan politik dapat memberikan manfaat baik kepada kader maupun masyarakat.

Pendidikan politik internal ini bertujuan untuk menciptakan kader partai yang berkualitas sehingga mampu menginternalisasi nilai-nilai partai yang tertuang dalam visi dan misi serta garis politik partai. Partai Golkar dan NasDem secara rutin melakukan pendidikan politik kepada kader. Keinginan partai untuk tetap melaksanakan pendidikan politik sebagai salah satu fungsi terbentuknya partai politik yaitu melaksanakan pendidikan politik dan ini telah terbukti. Hasil pendidikan politik ini dapat dilihat secara kasat mata adalah bahwa partai Golkar dan NasDem masih eksis dan menjadi partai kepercayaan rakyat. Menurut data yang diperoleh penulis

¹⁴Muhammad Fitrah, salah satu wakil Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 18 Oktober 2020.

dari KPUD Kabupaten sidrap, pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sidrap tahun 2019 Partai NasDem mendapatkan suara terbanyak yaitu sekitar 20, 02% dan Partai Golkar sebanyak 14,48% dari dua puluh partai yang ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2019 tersebut.

Pada dasarnya, Partai Golkar dan NasDem di Kabupaten Sidrap telah melaksanakan peranya sebagai subjek pelaksana pendidikan politik bagi kadernya, meski demikian penulis berharap agar segala upaya tersebut perlu dievaluasi agar kedepannya semua kader partai dapat menggunakan hak politiknya dalam hal ini mendapatkan pendidikan politik dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas upaya yang dilakukan oleh Partai Golkar dan NasDem di Kabupaten Sidrap.

4.2 Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Golkar dan NasDem di Kabupaten Sidrap

Pelaksanaan pendidikan politik dalam konsep *siyasah dusturiyah* menganut beberapa prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menghendaki agar setiap individu didudukkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Setiap orang harus memiliki derajat yang sama dihadapan hukum tanpa ada pendiskriminasian terhadapanya. Dalam suatu perumusan kebijakan atau pengimplementasian suatu kebijakan tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Peraturan harus senantiasa menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama dalam hak dan kewajiban.¹⁵ Prinsip keadilan dapat kita temui dalam Sad/38:26.

¹⁵Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 3.

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”.¹⁶

Politik hukum memandang prinsip keadilan mengandung arti bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setara setiap warga negara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Konstitusi harus menjamin bahwa setiap individu harus terjamin dan terpenuhi hak-hak individunya. Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa keadilan memiliki korelasi yang kuat dengan stabilitas negara, kemakmuran, kewibawaan negara, dan kedaulatan rakyat.¹⁷ Oleh karena itu, partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan memposisikan setiap kader dalam posisi yang sama.

2. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Prinsip *syura* yaitu proses diskusi untuk mencapai mufakat dengan melibatkan pihak pemerintah. Penerapan prinsip *syura* pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, mengenali masalah, sampai pada merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah. Penerapan mekanisme *syura* berarti memperluas partisipasi atau keterlibatan¹⁸ pihak-pihak dalam penyelesaian pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare. Allah Swt berfirman dalam Q.S Ali-Imran/3:159.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 54.

¹⁷Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 11.

¹⁸Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Conomica* Vol 6 No 1, Mei 2015, h. 74.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya :

“...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya”.¹⁹

Sedangkan di ayat lain, Allah Swt berfirman dalam Q.S asy-Syura/42:38.

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.²⁰

Kedua ayat di atas menggambarkan bahwa setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum harus diselesaikan melalui musyawarah. Secara sederhana musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan sebelum mengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan ditinjau dari sudut ketatanegaraan, musyawarah adalah prinsip yang konstitusional yang wajib dijalankan dalam suatu pemerintahan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak mencederai atau merugikan kepentingan masyarakat.²¹ Melalui musyawarah permasalahan mengenai kepentingan masyarakat dapat diselesaikan dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak untuk menghasilkan suatu keputusan yang objektif.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 54.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

²¹Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum*, h. 111-112.

3. Prinsip Persamaan (*al-musawah*)

Prinsip persamaan adalah prinsip yang menempatkan setiap orang pada posisi yang sama, tidak ada yang lebih istimewa dari lainnya atau tindakan diskriminatif kepada orang atau kelompok tertentu. Dengan demikian, setiap orang mempunyai kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan.²² Dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam kondisi apapun termasuk dalam hukum dan pemerintahan, maka segala bentuk sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang.

Prinsip persamaan bertujuan untuk menentang sistem dominasi kekuasaan serta perlawanan terhadap hierarki dan diskriminasi sosial. Dalam konsep modern, yang dimaksud prinsip persamaan adalah kesamaan kesempatan (*equality of opportunity*), yakni kesamaan dengan cara menghapus berbagai hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49:13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha teliti.”²³

Ayat di atas menegaskan bahwa dari segi penciptaannya, antara manusia yang satu dengan manusia lainnya tidak ada perbedaan. Islam juga mengakui bahwa manusia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan bangsa. Tetapi pada dasarnya

²²Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 3.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

mempunyai kedudukan yang sama dan setara (egaliter). Ketidaksamaan hanya dilihat dari segi ketakwaan seseorang.

Prinsip persamaan dalam Islam mengandung aspek yang luas. Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dan juga menjanjikan semua manusia memperoleh persamaan dan keadilan yang merata tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan ataupun keyakinannya. Persamaan dalam bidang hukum misalnya memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit.

Pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai adalah salah satu bentuk implementasi prinsip persamaan yang sesuai dengan asas *equality before the law* bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, bila hukum menjamin pendidikan politik bagi warga negara melalui partai politik, maka hukum dalam negara tersebut harus juga menjamin anggaran pelaksanaan pendidikan politik untuk mewujudkan prinsip persamaan sekaligus menjamin prinsip keadilan bagi seluruh warga negara.

4. Prinsip Kemaslahatan/Kemanfaatan

Prinsip kemaslahatan adalah prinsip yang mengiringi prinsip-prinsip sebelumnya, sebab dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip di atas, yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak.

Konsep mendasar dalam politik hukum Islam adalah *maqasid al-syari'ah*. Menurut konsep ini seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat serta mencegah

kerugian (*mafsadah*).²⁴ Konsep ini juga memandang bahwa setiap aturan hukum harus berorientasi mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tolak ukur kemaslahatan/kemanfaatan menurut Al-Ghazali harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syar'iah*, dalil-dalil kulli dan dalil *qoth'i* baik *wuruk* maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.²⁵

Para ahli hukum Islam membuat kategorisasi maslahat dalam dua jenis, yaitu maslahat yang bersifat individual-subjektif (*al-mashlahah al-khashshah*) dan maslahat yang bersifat sosial-objektif (*al-mashlahah al-'ammah*). Maslahat yang bersifat individual-subjektif, adalah maslahat yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain. Sedangkan maslahat yang bersifat sosial-objektif adalah maslahat yang menyangkut kepentingan orang banyak.²⁶

Prinsip kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni mencapai kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah mudarat sesuai dengan esensi hukum

²⁴Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 12.

²⁵A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29.

²⁶Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 13.

diberlakukan. Dengan kata lain, tujuan utama hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Oleh karena itu, negara sebagai fasilitator memiliki otoritas untuk menentukan kemaslahatan yang ingin dicapai. Kemaslahatan yang biasanya direfleksikan melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas untuk membentuk kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam konteks ini, negara sebagai pemangku kebijakan harus senantiasa memproduksi hukum yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang termasuk mengenai pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip *siyash dusturiyah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *siyash dusturiyah* dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai Golkar dan NasDem belum terlaksana secara optimal. Justifikasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, prinsip keadilan sebagai prinsip pokok dalam pelaksanaan pendidikan politik partai Golkar dan NasDem di Kabupaten Sidrap secara umum belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan fakta yang terjadi dilapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak kader partai yang tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait kegiatan atau pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Sidrap karena sosialisasi kegiatan tidak menyeluruh serta adanya keterbatasan kuota yang ditentukan dalam pelaksanaan pendidikan politik sehingga sebagian kecil kader tidak mendapatkan materi pendidikan politik. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip keadilan di mana setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan proporsional terhadap apa yang menjadi haknya.

²⁷Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Thafa Media, 20180), h. 84.

Kedua, prinsip musyawarah (*syura*) secara praktis partai Golkar dan partai NasDem telah melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Sidrap yang melibatkan kader atau anggota partai menjadi salah satu bentuk peran Partai Golkar dan NasDem dalam pendidikan politik di Kabupaten Sidrap.

Melalui pendidikan politik internal ini, Partai Golkar dan NasDem membentuk dan memberikan pemahaman politik bagi kadernya sehingga kader dapat membentuk dan menumbuhkan kepribadian dan kesadaran politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Meskipun realisasi di lapangan memang belum optimal karena sosialisasi terkait pendidikan politik masih bersifat parsial.

Ketiga, prinsip kemanfaatan/kemaslahatan juga belum optimal. Hal ini dikarenakan minimnya informasi terkait kegiatan pendidikan politik dan tidak menyeluruh sehingga kader partai tidak seluruhnya mendapat manfaat dari pendidikan politik yang dilaksanakan partai Golkar dan NasDem. Hal ini dapat disebabkan oleh pribadi kader sendiri yang belum mampu memahami materi yang disampaikan dalam pendidikan politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum maupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus senantiasa memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada masyarakat, namun dalam konteks ini kemaslahatan yang dimaksud belum tercapai.

Bukan hal yang mudah bagi partai Golkar dan partai NasDem Kabupaten Sidrap dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kadernya dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, mengingat partai Golkar dan NasDem merupakan partai yang berideologi Pancasila. Permasalahan yang bersifat kompleks juga menjadi alasan kuat atas belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*.